



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA

**KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas Mamuju

Telp. (0426)-2325088 Fax. (0426)-2325088.

Email : [kanwilsulbar@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilsulbar@kemenkumham.go.id) Laman : <https://sulbar.kemenkumham.go.id>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>DIVISI ADMINISTRASI</b>			
<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks
<b>DIVISI PEMASYARAKATAN</b>			
2	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82%
3	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
4	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
5	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%

6	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
9	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
<b>DIVISI KEIMIGRASIAN</b>			
10	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13
<b>DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b>			
11	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
		2. Persentase Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	86%
12	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %
13	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	12 Layanan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus

14	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	5 Laporan
15	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%
16	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan	13 Orang
17	Terselenggaranya Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Peninjauan/Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah	2 Kegiatan
18	Meningkatkan Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah	1. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	82%
		2. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%
		3. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,75 Indeks
		4. Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah	70%
		5. Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif	20%
19	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	1. Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah Instansi Pemerintah yang Meningkatkan Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Bebas HAM	1 Instansi Pemerintah
20	Meningkatnya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi
21	Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%
		2. Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah	1 Buku

Mamuju, 04 Januari 2023  
Kepala Kantor Wilayah  
Parindungan  
NIP 197007011992031002

